BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Esensi dari kedaulatan rakyat adalah memberikan ruang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Sejak lahir manusia sudah menyanggah hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Oleh sebab itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan dasar yang sangat penting bagi setiap negara yang disebut negara hukum. Jika dalam suatu negara Hak Asasi Manusia terabaikan atau dengan sengaja dilanggar dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.²

Bentuk perlindungan HAM salah satunya ialah, hak kekayaan intelektual. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang

¹Taufik Hidayat, Muskibah, dan Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 3, Nomor 3, 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.

²Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, 2021. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.³ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmannya.⁴

1. Hak cipta adalah ide dibidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda material bentuk jelmannya adalah buku.
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut hak kekayaan intelektual, benda bentuk jelmannya adalah lagu, tarian, lukisan.

³Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collatera (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012: 568–78.

⁴Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual*, Indonesia Prime, Makassar, 2016, hlm. 13.

3. Hak merek adalah ide dibidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagang.
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi pemilik, yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut.⁵

Ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Sirkuit Terpadu;
7. Rahasia Dagang, dan
8. Perlindungan Varietas Tanaman.

Secara bisnis, merek dagang merupakan sisi yang sah dari strategi pembuatan merek dan pemasaran barang-barang bermerek, yang terletak pada akar dari banyaknya pengembangan bisnis. Setiap pedagang mencoba untuk membedakan mereknya. Hal ini, bukan merupakan bagian dari kategori

⁵*Ibid*, hlm.13.

komuditas umum.⁶ Merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek dagang merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai fungsi penting dalam memperlancar dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa merek berfungsi untuk membedakan suatu barang tertentu dengan barang lain yang bentuknya serupa. Berbagai merek palsu untuk produk sejenis yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk yang menggunakan merek tersebut.⁷

Untuk mendapatkan hak atas merek, semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus mengajukan permohonan pendaftaran merek agar memperoleh hak merek dagangnya setelah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan yang telah tertuang pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa :

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”

⁶Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Cetakan 2, Jakarta, 2013, hlm. 111.

⁷Tifania Ayunda Prameswari, “Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM,” *Amnesti: Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 2, 2021: 97–104.

Kota Jambi menjadi salah satu kota di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya turut serta bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan (UMKM) industri makanan. Pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian terkhususnya di daerah Kota Jambi itu sendiri.⁸ Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat vital bagi perekonomian di Kota Jambi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM merupakan payung hukum untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tata pelaksanaan UMKM, selain itu Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai definisi UMKM dan kepemilikan usaha.⁹

Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian. Dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.¹⁰

⁸Taufik Hidayat, Muskibah, and Fathni, *Op. Cit*, hlm 432.

⁹Gunawan dan Egi Rizki Maulana Putra, "Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2023: 891–98, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>.

¹⁰Syaakir Sofyan, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Bilancia*, Volume 11, Nomor 1, 2017: 33–59, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>.

Berdasarkan penelitian pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Jumlah UMKM di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk melihat jumlah UMKM di Kota Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Di Kota Jambi Dari Tahun 2020 Sampai 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Di Kota Jambi Tahun 2020-2023			
		2020	2021	2022	2023
1.	Jambi Timur	4279	7084	6528	6421
2.	Jambi Selatan	3773	4721	5178	5698
3.	Danau Teluk	1329	2323	2161	1984
4.	Danau Sipin	3103	4248	4457	4237
5.	Kota Baru	3657	4147	5313	4999
6.	Pasar Jambi	1034	1434	2690	897
7.	Alam Barajo	4095	5189	6029	4298
8.	Jelutung	3827	4982	4845	4573
9.	Telanaipura	2093	3957	4265	3958
10.	Pelayangan	2026	3051	2666	1436
11.	Paal Merah	5719	7360	7126	6342
	Jumlah	34941	48496	51278	44843

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kota Jambi

Dalam membangun kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. UMKM industri makanan menjadi salah satu indikator usaha yang membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan jumlah UMKM industri makanan di Indonesia mencapai puluhan juta, terdapat fakta bahwa tidak banyak UMKM industri makanan kemudian sadar akan pentingnya merek dagang bagi UMKM, termasuk UMKM industri makanan di Kota Jambi.¹¹ Pada saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang industri makanan di Kota Jambi menunjukkan tendensi peningkatan dari waktu ke waktu. Untuk melihat jumlah UMKM makan di Kota Jambi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah UMKM Indutri Makanan Di Kota Jambi Tahun 2023

NO	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Di Kota Jambi Tahun 2023
1.	Jambi Timur	1677
2.	Jambi Selatan	1460
3.	Danau Teluk	301
4.	Danau Sipin	984
5.	Kota Baru	1151
6.	Pasar Jambi	361
7.	Alam Barajo	916
8.	Jelutung	1207
9.	Telanaipura	822
10.	Pelayangan	368
11.	Paal Merah	1556
	Jumlah	10803

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kota Jambi

¹¹Firman Setyaji and Muhammad Vicky, *Pentingnya Merek Dagang Bagi Unit Usaha Dan Strategi Pendaftaran Bagi UMKM Bagi Unit Usaha Dan Strategi*, Forbil Institute, Yogyakarta, 2022, hlm. 3

UMKM mempunyai hubungan yang saling membutuhkan dengan kekayaan intelektual untuk mengantisipasi dan melindungi mereknya, terutama jika terjadi perselisihan. Namun perlindungan ini hanya diberikan apabila merek sudah didaftarkan.¹²

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi. Dari kurun tahun 2020 hingga 2023, hanya sedikit merek dagang UMKM industri makanan Kota Jambi yang terdaftar di Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Dimana dalam kurun tahun 2020 hingga 2023 terdapat 34 pelaku UMKM industri makanan Kota Jambi yang melakukan permohonan pendaftaran merek dagang, dan hanya 17 merek dagang UMKM industri makanan Kota Jambi yang telah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, berdasarkan data yang penulis peroleh masih terdapat 10.769 para pelaku UMKM industri makanan di Kota Jambi yang belum mendaftarkan merek dagangnya. Untuk melihat daftar merek dagang UMKM industri makanan Kota Jambi yang telah terdaftar pada Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹²I Gusti Ayu and Agung Ananda, “Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11, Nomor 3, 2023.

Tabel 1.3
Daftar Merek Dagang UMKM Kota Jambi Yang Terdaftar Pada Kantor
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jambi

No	Tahun	Jumlah Permohonan Pendaftaran	Jumlah Merek Dagang Yang Terdaftar	Nama Merek Dagang Yang Terdaftar
1.	2020	5	3	1. Moslem 2. Tawon Gong Jumb Bee 3. Henho
2.	2021	6	4	1. Zazid Brownies 2. Pempek Hafish 3. Bunga Zahra 4. GMS
3.	2022	10	9	1. Bahump's 2. Pasni Tahu 3. Upoji 4. Kejelia 5. Moriyya 6. Medo Snack\ 7. Altaffood 8. Akhdan Madu 9. Sambelan Bu Oky
4.	2023	13	1	1. Rumah Kreatif Nekno

Sumber: Ditjen HKI Kanwil Kemenkumham Jambi

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti, Sehingga judul yang dipilih **“Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Industri makanan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa sebagian pelaku UMKM industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya sementara sebagian lainnya belum melakukan pendaftaran merek dagangnya?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Maka sebagai tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah

- a. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan sebagian pelaku UMKM industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya sementara sebagian lainnya belum melakukan pendaftaran merek dagangnya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat / kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penulis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pihak-pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan berkenaan dengan Merek dagang

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya mewujudkan atau mengerjakan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau tindakan dari sebuah strategi yang sudah dibuat secara matang dan teratur, Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹³

Menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah menghidupkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya bertekad dan berjuang dengan giat untuk mencapai tujuan dengan rela serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁴

Selanjutnya pengertian pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendataan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar. Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.

¹³Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekata Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persada Ujung Pandang, Jakarta, 1987, hlm. 40.

¹⁴Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 10.

2. Merek Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.¹⁵

a. Usaha Mikro

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengatakan bahwa:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

b. Usaha Kecil

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengatakan bahwa:

¹⁵“UMKM,” Kelurahan Sukorejo, n.d., <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

c. Usaha Menengah

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengatakan bahwa:

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

4. Kemenkumham

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan badan vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap negara bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶

¹⁶“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf>.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Berkaitan dengan merek dagang, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas merek pelaku usaha dari sesuatu yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau perselisihan antar merek. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:¹⁸

a. Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau representasi terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik.

Perlindungan hukum preventif mempunyai implikasi yang besar terhadap tindakan negara yang berdasarkan kebebasan bertindak, karena mendorong negara untuk mengambil keputusan berdasarkan

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

kehati-hatian dan kebijaksanaan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlakuan terhadap perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum dari perbuatan negara didasarkan dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian dalam sejarah Barat muncul konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk membatasi dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Ini berarti penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berikutnya, Hamis MC. Rae juga mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum tersebut harus dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika pelaksanaannya mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaslian dari hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi, pada penelitian ini penulis membahas mengenai “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kota Jambi”. Terdapat sejumlah skripsi yang membicarakan tema yang serupa dengan penelitian ini, namun dengan isu yang berbeda. Sebagai perbandingan, yaitu:

1. Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi oleh Puti Indah Ramaya, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Tahun 2022. Dalam skripsi ini memaparkan mengenai Apa penyebab pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi dan Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pendaftaran merek dagang.¹⁹ Sedangkan skripsi penulis memaparkan mengenai mengapa sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi tidak

¹⁹ Puti Indah Ramaya, "*Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Batanghari, 2022.

melakukan pendaftaran merek dagangnya dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.

2. Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek oleh I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Jurnal pada Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Tahun 2023. Perbedaan didalam penelitian ini yakni pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada jurnal ini memaparkan tentang bagaimana urgensi pendaftaran merek pada UMKM menurut Undang-Undang Merek dan bagaimana akibat hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Merek²⁰. Sedangkan skripsi penulis memaparkan mengenai mengapa sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi tidak melakukan pendaftaran merek dagangnya dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.
3. Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Pemalang oleh Muhammad Arsyadu Shiyam, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020. Pada skripsi ini membahas tentang Merek Kolektif dan lokasi penelitian yang berada di

²⁰ Ayu and Ananda, "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek." *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11, Nomor 3, 2023.

Kabupaten Pemalang. Pada skripsi ini memaparkan tentang apa pentingnya pendaftaran merek kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.²¹ Sedangkan skripsi penulis memaparkan mengenai mengapa sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan di Kota Jambi tidak melakukan pendaftaran merek dagangnya dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu penulis akan meneliti perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kota Jambi”. Sehingga hasil penelitian yang akan penulis lakukan ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman ilmiah bagi kita semua,

²¹ Muhammad and Arsyadu Shiyam, *"Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randudongkal Di Kabupatrn Pemalag"*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara bagaimana mengampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengaruskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan di beberapa tempat pelaku UMKM industri makanan kota jambi yang beralamat di Kec.Telanaipura, Kec. Kota Baru dan Kec. Pasar Jambi, Penelitian juga dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)Jambi, dan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 127.

²³*Ibid.*, hlm.125.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Industri Makanan Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Kota Jambi.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer (Data Lapangan)

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap responden.

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang diperoleh dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, rancangan undang-undang, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia beserta media elektronik atau hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Pendaftaran merek dagang oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi.

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Pihak pelaku UMKM Industri Makanan di Kota Jambi.

Sifat populasi dari penelitian ini adalah bersifat Homogen. Populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lainnya.

Jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu 10.803 pelaku UMKM dalam klasifikasi yang bersifat homogen dan dari populasi yang bersifat homogen penulis mengambil secara *purposive* sebanyak 12 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sampel

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.²⁴

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka penulis memilih 1 orang informan masing-masing dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Serta penulis juga memilih 12 orang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai responden yang diambil secara homogen, yaitu 7 orang sebagai responden dari pengusaha UMKM industri makanan yang belum mendaftarkan merek dagangnya dan 5 orang dari pelaku UMKM industri makanan sudah mendaftarkan merek dagangnya

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak pelaku UMKM industri makanan sebagai responden dan dengan Kasubag Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, dan dan Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi sebagai informan.

2) Studi Dokumen

Penelitian dokumen atau metode dokumentasi mengacu pada data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan juga di kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian tertentu untuk selanjutnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis memberikan gambaran dan uraian tentang Pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri makanan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang merek dan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bab yang menguraikan tinjauan umum tentang merek yaitu mengenai pengertian merek dagang, fungsi merek, pembagian merek, tujuan pendaftaran merek, prinsip merek, syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran merek, pengalihan lisensi merek, dan pengaturan hukum tentang merek di Indonesia. Tinjauan umum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu mengenai pengertian UMKM, kriteria UMKM dan asas-asas UMKM

BAB III Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri Makanan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab ini berisi pembahasan yang menguraikan tentang alasan-alasan sebagian pelaku UMKM industri makanan di Kota Jambi melakukan upaya pendaftaran merek dagangnya sementara sebagian lainnya belum melakukan pendaftaran merek dagangnya dan kendala-kendala yang

dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah industri makanan di Kota Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan ringkasan yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.